ORANGTUA TIDAK BOLEH LEPAS TANGAN

Dispensasi Pernikahan Anak Jadi Perhatian

YOGYA (KR) - Angka dispensasi pernikahan anak harus menjadi perhatian semua pihak. Kendati kasus di Kota Yogya tidak tergolong tinggi namun hasil dari proses pendampingan sebagian besar anak masih belum memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pernikahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, menjelaskan pengajuan dispensasi pernikahan anak selain ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) juga melalui Pengadilan Agama (PA). Dalam pemutusannya, PA pun meminta pertimbangan UPT Perlindungan Perempuan Anak yang berada di bawah DP3AP2KB Kota Yogya.

"Bagi anak usia 18 tahun ke atas rata-rata sudah ada kesiapan, tapi yang di bawah usia tersebut masih bingung setelah itu mau bagaimana," urainya dalam jumpa media, Rabu (16/2).

Merujuk Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Khusus, batas usia pernikahan dikoreksi menjadi minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga bagi yang mengajukan pernikahan di bawah usia tersebut masuk kategori pernikahan anak yang harus mendapatkan dispensasi.

Edy menambahkan, orangtua tidak bisa lepas tangan jika ada anaknya melakukan pernikahan. Hal ini karena usia anak masih menjadi tanggung jawab orangtua. "Kami sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah pernikahan anak. Di antaranya membentuk forum anak hingga tingkat kota, pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, berbagai parenting, kerja sama dengan ormas hingga sosialisasi," urainya.

Jumlah pernikahan anak yang mengajukan dispensasi melalui DP3AP2KB Kota Yogya pada tahun 2021 lalu mencapai 46 pasang. Tujuh pasang di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Mayoritas penyebabnya ialah alasan kehamilan yang mencapai 43 pasang. Sisanya karena mencegah hal negatif, akan pindah ke luar DIY, dan kewajiban orangtua.

Di samping itu, Edy juga menyebut, Pemkot Yogya telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) 7/2019 yang khusus mengatur pencegahan pernikahan anak. Pihak yang bertanggung jawab tidak hanya pemerintah melainkan juga keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan media massa.

Sementara Panitera Muda Permohonan PA Yogyakarta Titik Handriyani, juga menegaskan alasan pengajuan dispensasi pernikahan anak mayoritas karena kondisi calon istri yang sudah hamil. Bahkan ada pula yang sudah melahirkan bayi baru mengajukan dispensasi menikah.

"Kita juga prihatin melihat kondisi anak-anak kita belum masuk usia pernikahan sesuai undang-undang tapi mengajukan dispensasi karena faktor demikian," katanya.

Oleh karena itu perlu dicarikan solusi yang terbaik guna menekan bahkan mencegah terjadinya pernikahan anak. Selain regulasi yang memperketat pernikahan anak, semua pihak yang berkaitan harus bergerak bersama. **(Dhi)-f**

Pemda Terapkan WFH 50 % di Perkantoran

YOGYA (KR) - Meningkatnya kasus Covid-19 di DIY dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh disepelekan. Apalagi pada Rabu (16/2) kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY sudah mencapai 1476 kasus. Bahkan penyebaran atau penularan kasusnya saat ini sudah sampai di lingkungan perkantoran. Termasuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY.

Rata-rata pegawai yang terpapar Covid-19 dari hasil tracing atau penelusuran kontak erat dengan pasien Covid-19. "Pegawai sudah ada yang terpapar Covid-19 kebanyakan tertular dari anggota keluarga sehingga dapat dikatagorikan sebagai klaster keluarga. Selain itu, penularan juga dari hasil pemeriksaan mandiri ketika pegawai tersebut hendak melakukan perjalanan ke luar daerah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji dikantornya, Rabu (16/2).

Dikatakan, sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemda DIY untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Salah satu bentuk pencegahan itu, apabila ditemukan penularan di perkantoran, OPD bersama petugas kesehatan akan langsung melaksanakan tracing dan menutup sementara sebagian kantor atau bidang yang ditemui ada penularan. Langkah itu diambil untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas atau klaster baru.

"Kalau ditemukan suspek maka segera dilakukan lockdown satu dua hari untuk dilakukan disinfektan dan dilakukan pembersihan. Selain itu Pemda DIY juga memberlakukan kebijakan work from office (WFO) dengan kapasitas 50 persen dari total pegawai. Sedangkan sisanya bekerja secara daring dari rumah masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang masih diberlakukan," jelas Sekda DIY.

Menurut Baskara Aji, sebagian besar pegawai yang terpapar Covid-19 bergejala ringan atau tak menunjukkan gejala sama sekali. Hal ini disebabkan karena cakupan vaksinasi di kalangan pelayan publik telah melampaui 100 persen dan mayoritas dari ASN telah menerima suntikan vaksin booster. Kendati demikian Sekda DIY tetap mengingatkan tentang pentingnya penegakan Prokes mengingat kasus harian saat ini masih tinggi dan pandemi belum berakhir.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY Amin Purwani menuturkan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait temuan penularan Covid-19 di lingkup OPD Pemda DIY. **(Ria)-f**

PROSES PENGHUNIAN TOWER II RUSUN BENER DIHENTIKAN

Warga Isolasi Mandiri Harus Tetap Dimonitor

YOGYA (KR) - Banyaknya masyarakat yang kini menjalani isolasi mandiri di rumah harus tetap mendapatkan pengawasan. Di samping memastikan kebutuhan hariannya tercukupi, warga isolasi mandiri karena terpapar Covid-19 juga harus menjalani isolasi sesuai ketentuan. Upaya tersebut agar penularan virus bisa semakin cepat dicegah.

"Isolasi mandiri itu bukan berarti dibiarkan. Teman-teman di wilayah baik mantri, lurah maupun babinsa yang ada di situ agar mengawasi. Kami tetap bertanggung jawab," tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Rabu (16/2).

Pengawasan atau monitor tersebut meliputi pasokan vitamin yang perlu dikonsumsi, kebutuhan untuk makan minum serta memastikan tidak beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu mantri dan lurah wajib mengetahui jumlah maupun kondisi warganya yang menjalani isolasi mandiri.

Sementara itu, penyiapan lokasi isolasi terpadu yang memanfaatkan Tower II Rusun Bener Tegalrejo juga terus dikebut. Menurut Haryadi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang memiliki gedung tersebut sudah memberikan persetujuan. Sembari menunggu surat resmi, pihaknya pun menyiapkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. "Meski yang tower satu juga masih ada ruang namun lebih baik sedia payung sebelum hujan," katanya.

Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Yogyakarta Wisnu Windarto, menjelaskan proses penghunian Tower II Rusun Bener Tegalrejo sudah resmi dihentikan. Penghentian pendaftaran bagi calon penghuni dari masyarakat umum tersebut sudah diberlakukan sejak 8 Februari 2022 lalu. Dirinya pun belum bisa memastikan kapan proses penghunian akan dilanjutkan kembali

Diakuinya, penghentian proses penghunian tersebut karena kebijakan untuk pemanfaatan Tower II Rusun Bener Tegalrejo sebagai tempat isolasi terpadu pasien Covid-19 dengan gejala ringan maupun tanpa gejala. Sebelumnya ada sekitar 100 warga yang telah mengambil formulir, sedangkan yang mengembalikan baru sebagian. "Blangko sudah kita tutup, sampai kapan itu kita juga tidak tahu. Kemantren dan kelurahan juga sudah kita informasikan akan hal itu," tandasnya.

Kapasitas Tower II Rusun Bener Tegalrejo mencapai 44 kamar. Dua kamar di antaranya khusus bagi penyandang disabilitas. Kondisinya pun sudah siap huni dan rencananya tarif sewa sekitar Rp 500.000 per bulan. **(Dhi)-f**

MAKSIMALKAN POTENSI PBB - P2

Pemutakhiran Data Digeber di Mergangsan

YOGYA (KR) - Setelah Kemantren Ngampilan, Mantrijeron, Wirobrajan, Gondomanan dan Pakualaman, akan dilakukan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Tahun 2022 di wilayah Kemantren Mergangsan Kota Yogya. PBB - P2 masih menjadi primadona pendapatan Pajak Daerah dan terus dimaksimalkan potensinya.

"Pelaksanaan bekerjasama dengan kelurahan dan warga masyarakat selaku surveyor di masing-masing wilayah mulai minggu pertama bulan April 2022," tutur Sub Bid Penetapan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Yogyakarta Rohmad Romadhon dalam sosialisasi, Rabu (16/2) siang di Kantor Kemantren Mergangsan Yogyakarta.

KR-Juvintarto

Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB - P2 Tahun 2022 di Kemantren Mergangsan.

Didampingi Sub Koordinator Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah Bayu Suwitana, dan Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Mergangsan Pargiyat SIP sosialisasi dihadiri jajaran Ketua RW. "Sejak peralihan PBB P-2 ke Pemda/Pemkot tahun 2012, masih banyak data yang tertera dalam ketetapan SPPT PBB belum sesuai dengan kondisi yang ada sekarang sehingga perlu pemutakhiran data," ungkap Rohmad.

Rohmad menyebutkan data-data lama sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini seperti nama subjek yang tidak sesuai kepemilikan/pemanfaatan, alamat subjek dan objek pajak yang kurang lengkap. "Juga perubahan objek pajak misal luas bangunan, objek pajak tidak ada atau belum terdaftar, banyak SPPT yang tidak terkirim ke wajib pajak, dan lainnya," jelas Rohmad.

Karenanya bila dalam Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 warga menghendaki perubahan (mutasi) nama, alamat, pecah, gabung maupun pembetulan nama dan alamat agar melengkapi dan memenuhi persyaratan. "Di Kemantren Mergangsan tunggakan PBB-P2 per kelurahan mencapai Rp 4,63 M (Brontokusuman), Rp 4,46 M (Keparakan) dan Rp 3,88 M," papar Rohmad.

Pemutakhiran Basis Data Objek dan/atau Subjek PBB-P2 di Wilayah Kemantren Mergangsan dapat menghasilkan basis data SISMIOP PBB-P2 yang semakin lengkap dan akurat. "Masyarakat selaku wajib pajak sudah semakin sadar pajak," ucap Pargiyat. **(Vin)-f**

Tim Riset UST Kembangkan Potensi Wisata Daerah

KR-Istimewa

Pemandian air hangat, wisata unggulan Candi Umbul.

YOGYA (KR) - Tim riset keilmuan skema kewirausahaan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta melakukan riset yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di kawasan Candi Umbul, Magelang. Dalam kegiatan penelitian, tim riset bekerja sama dengan mahasiswa KKN UST periode II tahun ajaran 2021/2022 pada 27 Desember 2021-7 Februari 2022.

Tim riset diketuai Dr Muhammad Irfan SSi MPd dengan anggota Dwi Susanto MPd, Flora Grace Putrianti SPsi MSi, Irmawati, Andini Wahyu Syafira, Maria Gorety Tae, Karunia Kalifah Wijaya, Alvianita Ratna Nilawati, dan Ade Irmansyah. Adapun tema penelitian 'Strategi Tourism Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Wisatawan dan UMKM di Pemandian Air Hangat Candi Umbul'.

Muhammad Irfan menyampaikan, Dusun Candi Umbul memiliki potensi wisata meliputi pemandian air hangat, pasar rakyat dan stasiun kereta api uap (milik PT KAI) yang kini sudah tidak beroperasi. "Pemandian air hangat Candi Umbul merupakan salah satu objek wisata unggulan di desa tersebut," terang Irfan dalam siaran pers yang diterima *KR*, Rabu (16/2).

Untuk Pasar Rakyat Candi Umbul (PRC), menurut Irfan, dikelola oleh karang taruna berkolaborasi dengan masyarakat Dusun Candi Umbul. Awal terbentuknya PRC dilatarbelakangi karena menurunnya perekonomian akibat Covid-19. Selain menjual beragam produk UMKM, terdapat wahana permainan anak serta live music yang bisa dinikmati semua kalangan. "Diharapkan dengan adanya PRC ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat," ujarnya.

Adapun stasiun kereta api uap letaknya di tengah persawahan Dusun Candi Umbul. Stasiun kereta api itu hanya tersisa bangunan tanpa atap dan rel kereta yang telah tertimbun tanah. "Situs peninggalan stasiun kereta api uap kedepan perlu dikelola lebih baik karena memiliki potensi sebagai destinasi wisata," pungkasnya. **(Dev)-f**